

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
SUB UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONY NURHASTUTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3. NHK : 56009

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	111.000.000
1. Tanah Seluas 137 m2 di TEMANGGUNG, WARISAN	Rp.	
85.000.000		
2. Tanah Seluas 626 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI	Rp.	
26.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	298.900.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI		
Rp. 5.900.000		
2. MOBIL, HONDA CITY GM 2 1,5 E MY Tahun 2009, HASIL SENDIRI		
SENDIRI Rp. 153.000.000		
3. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI		
140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	382.434.967
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	828.334.967
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	828.334.967



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.